

STRATEGI PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MENGHADAPI MEA

Lue Sudiyono, M.M.
lue_mm@yahoo.co.id
IKIP PGRI Wates

ABSTRACT

Globalization Era always in sight, one implementation of the Summit in Kuala Lumpur in 1997 which resulted in the Asean Economic Community (AEC) is a form of economic integration with the concept of the economic system of free trade between countries and announce an agreement to transform ASEAN into a region that is stable, prosperous and highly competitive with equitable economic development, reduce poverty and socio-economic disparities.

In order to face the AEC, Multicultural education is a means of making a choice on the perspective of pluralism, democracy, as the value of a positif world view of the attitudes and behavior of theoretically and practically, so that in the educational curriculum no longer make the values and traditions of the culture dominate the practice of school learning, but learning is expected to create a creative man, cultured, efficient and optimal competitiveness.

*State responded by various policies, especially the development of human resources, infrastructure, form a professional association of educators to act as a driving force of education, implementation of the system of multicultural learning strategy; **The first** study is directed not only on the cognitive elements but elements of affective and psychomotor implemented jointly, **second**, Emphasis on critical thinking skills that are innovative, **three** emphasis on contextual learning to shape values and attitudes, then **the three** strategies are implemented convessionalism approach, perspective and constukctivism deconvessionalism.*

Keywords: *Multicultural Education Strategy, AEC*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi karena proses Informatisasi yang cepat semakin membuat kehidupan di planet dunia semakin meluas dan sekaligus dunia semakin mengerut, masalah kehidupan menjadi masalah global, karena tidak bisa terlepas dari kejadian belahan bumi yang lain, baik masalah ekonomi, politik, maupun social budaya.

Pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok didirikan oleh lima Negara Asia Tenggara (Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) telah berperan penting dalam menjamin stabilitas kawasan dari bahaya komunis merupakan suatu kerja sama ekonomi, tegnologi dan sosial budaya melalui bidang politik dan keamanan (CPF.Luhulima,2008 :2).

Sejak awal didirikan ASEAN bercita-cita mewujudkan ASIA Tenggara bersatu, sehingga keanggotanya mengalami penambahan sampai dengan tahun 1999 mencapai sepuluh Negara yaitu ; Brunai Darrusalam 1984, Vietnam 1995, Laos 1997, Myanmar 1997 dan Cambodia 1999 (CPF.Luhulima,2008 :2).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada 12-13 Januari 2007 telah dicapai keputusan penting, yakni kesepakatan untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN 2015, yang dikenal dengan Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asia (MEA atau ASEAN Economic Community (AEC), (CPF.Luhulima, 2008:6).

Semangat MEA yang akan membangun sebuah system baru perekonomian di Kawasan Asean melalui perdagangan bebas antar Negara anggota Asean tentunya dengan segala risiko-risiko yang muncul bisa berdampak positif ini sebagai peluang dan negatif ini merupakan ancaman bagi pembangunan, hal tersebut sangat tergantung kepada pemerintah dan rakyat sebagai warga Negara dalam menyikapinya, terutama para pelaksana pendidikan sebagai motor penggerak.

Dampak positif MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dengan sistem ekonomi perdagangan bebas antara Negara-negara anggota Asean dengan

perjanjian MEA atau ASEAN Economic Community (AEC) sebuah keputusan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Dampak negatif : kurangnya kesiapan masyarakat baik dari segi kualitas dan kuantitas sarana penunjang untuk pemahaman, akibat dari SDM yang rendah sehingga kurang dapat mengantisipasi resiko- resiko yang muncul dari dampak tersebut.

Pendidikan bertugas untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab setiap warga Negara secara global, sehingga memerlukan informasi yang cepat , tepat serta kecerdasan yang memadai menjadi masyarakat madani.

Pendidikan multikultural merupakan upaya mengantar perjalanan hidup manusia untuk memahami keadilan menuju kehidupan yang demokratis, dalam pengelolaan tidak terlepas dari upaya melakukan pilihan terhadap perspektif pluralisme, demokrasi, sebagai nilai pandangan dunia yang positif terhadap sikap dan perilaku secara teoritik maupun praktis, sehingga didalam kurikulum pendidikan tidak lagi menjadikan nilai dan tradisi budaya menjadi dominan menguasai praktek

pembelajaran disekolah, tetapi pembelajaran diharapkan dapat menciptakan manusia kreatif, berbudaya, berdaya guna dan berdaya saing yang optimal.

Permasalahan yang muncul, bagaimana kebijakan Negara mengantisipasi fluktuasi risiko-risiko yang muncul dalam perjanjian MEA atau ASEAN Economic Community (AEC) agar berdampak positif bagi pembangunan kehidupan masyarakat pada umumnya ?

Fluktuasi risiko-risiko yang muncul akan terjadi sangat cepat sebagai dampak, oleh karena itu kebijakan Negara yang tepat dan cepat dengan berbagai kebijakan terutama pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan sarana prasarana, serta memperkuat lembaga pendidikan dengan membentuk asosiasi profesi, untuk itu pendidik harus bisa berperan sebagai motor penggerak, selain itu penyelenggaraannya dalam sistem pembelajaran multikultural dengan strategi ; **Pertama** pembelajaran diarahkan tidak hanya pada unsur kognitif saja tetapi unsur afektif dan psikomotor dilaksanakan secara bersama-sama, **kedua**, Penekanan pada kemampuan berfikir kritis yang inovatif dengan kemampuan berbahasa Internasional, **ketiga** penekanan pada pembelajaran kontekstual untuk membentuk nilai dan sikap kompetitif yang positif, selanjutnya

ketiga strategi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan konvensionalism, perspektif deconvensionalism dan constuktivism.

B. PEMBAHASAN

1. Pendidikan Multikultural

Menurut Zainuddin, 2010 : 272 menyatakan bahwa pendidikan memberi peran yang besar dalam penyediaan SDM yang berkualitas berdaya saing tinggi dan menentukan terjadinya berbagai perubahan social.

Lue. 2012 : 31 mengemukakan bahwa pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa.

Dalam UU. No 20/2003 pasal 4ayat 1 menyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia , nilai- nilai keagamaan nilai kultural dan memajemukan.

Di era Globalisasi Pendidikan Salah satu fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat modern dan post modern yang ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya kehidupan multikultural. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang

begitu beragam dan luas. Namun keberagaman ini dapat merupakan ancaman yang dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme tersebut.

Paradigma pendidikan multikultural sangat relevan diterapkan di negara-negara yang multietnis dan multibudaya, karena keragaman budaya jika dikelola dengan baik akan mampu membentuk karakter bangsa yang kokoh dan dapat merupakan suatu kekayaan bagi bangsa negara.

2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

a. Tinjauan MEA secara Historis

Dimensi globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa disegala bidang. Rugman, Alan. 2000 (Dirertorat dan Kemahasiswaan Dikti 2013), menyebutkan ada 3 (tiga) thema atau dimensi globalisasi, yaitu : *Economic globalization, political globalization, cultural globalization*

Menurut Michael P.Todaro (1983: 124) ”mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan

perubahaan- perubahan dalam struktur social, sikap mental dan lembaga-lembaga social, termasuk percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pemberantasan kemiskinan, nilai – nilai kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan yang menggambarkan tujuan umum yang diusahakan oleh individu dan masyarakat”

Indonesia menganut konsep hakikat Pembangunan manusia dan masyarakat seutuhnya, dan paradigma pembangunan nasional mulai terbentuk dalam sidang –sidang seminar Tentara Republik Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) ke II yang diselenggarakan dibandung tahun 1966, dan pedoman pembangunan nasional harus dilandaskan pada Pancasila Dan Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 dengan memperhatikan perkembangan internasional (Syaidiman Suryohadiprojo.1998).

Semua unsur- unsur diatas pasti tidak terlepas dari pembangunan ekonomi, oleh karena itu Indonesia sebenarnya sudah mempunyai landasan hukum yang jelas dibidang ekonomi sudah trecantum dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1,2 dan 3, pasal 34, dan pasal 27 ayat 2. Kalau diringkas bahwa dari pasal- pasal tersebut berisi suatu gambaran untuk mewujudkan suatu cita-cita bangsa, perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar azas

kekeluargaan, dimana pemerintah sebagai pendorongnya dalam system politik otorian dengan menciptakan dasar stabilitas yang solit dengan proses pertumbuhan ekonomi tidak terganggu, dalam politik luar negeri Indonesia sejak era **Presiden Soekarno** presiden pertama Republik Indonesia (1945) sudah menganut politik bebas aktif.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan adanya infestasi baik dari lembaga pemerintah atau swasta dalam negeri maupun infestasi asing, ini merupakan salah satu bentuk dari globalisasi ekonomi sebagai proses terintegrasinya perekonomian kearah masyarakat ekonomi dunia yang saling terkait, saling tergantung, dan saling mempengaruhi.

Ketika terjadi persoalan de-ideologisasi / persoalan ideologis ditingkat global dan regional terutama bahaya komunis, itu terbantahkan dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan lima Negara ASEAN dan sampai tahun 1999 anggotanya menjadi sepuluh Negara, Terakhir pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007 menjadi dua belas Negara dengan komitmen pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015, dan sejak tahun 2003 dalam KTT lanjutan di Bali pemimpin ASEAN menyatakan bahwa kegiatannya dalam bentuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi

ekonomi regional pada tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan Menteri Ekonomi negara ASEAN pada 2006 di Malaysia, yang menghasilkan keputusan untuk memajukan pelaksanaan MEA menjadi 2015 dan pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 12-13 Januari 2007, Sejak awal didirikan ASEAN bercita – cita untuk mewujudkan Asia Tenggara bersatu, sehingga keanggotaannya terus bertambah mencapai 12 negara (CPF.Luhulima, dkk.2008)

Semangat ASEAN sampai terbentuknya MEA yang akan membangun sebuah system baru perekonomian di Kawasan Asean melalui perdagangan bebas antar Negara anggota Asean tentunya bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi rakyat, karena masing-masing perseron memiliki daya kompetisi yang berbeda, perjanjian ini telah dihasilkan dari proses yang panjang dimulai dari 1967 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur tahun 1997 menghasilkan sebuah keputusan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

b. Tujuan MEA

Kesepakatan Bali II pada 7 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh sepuluh (10) kepala Negara

(Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai Darusalam, Vitnam, Laos, Myanmar, dan Cambodia) membentuk suatu masyarakat ASEAN dengan tiga filar yaitu:

- 1) Masyarakat Keamanan
ASEAN, bertujuan menjamin supaya Negara anggota bisa hidup damai sejahtera yang satu dengan yang lain maupun dunia luar Asia Tenggara
- 2) Masyarakat Ekonomi ASEAN ; bertujuan menciptakan suatu masyarakat sejahtera yang juga ditandai oleh pergerakan barang, jasa, modal serta tenaga-tenaga berketrampilan dan berpendidikan tinggi.
- 3) Masyarakat Sosial Budaya ASEAN; bertujuan menciptakan suatu masyarakat yang saling asah, asih, asuh serta memiliki identitas regional. (CPF.Luhulima, dkk. 2008)

Pada awal didirikan tahun 1967 dengan kesepakatan Konsep untuk mewujudkan Asia Tenggara Bersatu merupakan cita – cita, dan mempunyai tujuan yang sama yaitu membina perdamaian, menciptakan kesejahteraan dan membangun identitas regional, selanjutnya untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan

dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Dibawah ini disajikan bendera 10 (sepuluh) Negara Anggota ASEAN dibawah ini :



c. Deklarasi MEA

Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan lima Negara ASEAN dan sampai tahun 1999 anggotanya menjadi sepuluh Negara, Terakhir pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007 menjadi dua belas Negara dengan komitmen pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015, dan sejak 2003 dalam KTT lanjutan di Bali pemimpin ASEAN menyatakan bahwa kegiatannya dalam bentuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020. Setidaknya 4 (empat) hal yang menjadi pilar persoalan dan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 dalam pelaksanaannya. Menurut para ahli ekonomi politik, terdapat empat hal yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia;

Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan

ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang; dan oleh Andre Gunder Frank (pencetus teori dependensi) disebut sebagai “*a metropolis-satellite model*”. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

3. Peran dan Tanggungjawab Pemerintah

Globalisasi diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi kelangsungan hidup bangsa, namun disisi lain juga menimbulkan fenomena - fenomena dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, *pertama*, sebagai ancaman

ditengarai oleh adanya dampak negatif bagi bangsa dan negara, dan *kedua* sebagai peluang, itu akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa.

Peran dan tanggungjawab Negara khususnya Indonesia terhadap hak dan jaminan masyarakat sebagai warga Negara seperti yang telah diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 harus diimplementasikan menjadi nyata. Tahun 2014 mulai dari saat kampanye Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah memiliki program prioritas dalam membangun perekonomian masyarakat secara mandiri melalui “Nawa Cita”. Pada poin program Nawa Cita ke-7 dinyatakan “Kami akan mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.”

Dalam perspektif hukum, kebijakan Indonesia yang mengikatkan diri pada MEA merupakan sebuah perjanjian internasional yang menjadi kewenangan dari Presiden sebagaimana UU No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun setiap kesepakatan dan perjanjian yang dibuat bersama Negara lain dalam bentuk bilateral dan kawasan (ASEAN) tidak boleh mengesampingkan UUD tahun 1945 dan HAM. Indonesia mengikatkan diri pada MEA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2014 tentang Pengesahan *Protocol*

to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang).

Di dalam Peraturan ini terdapat dua pasal yang mengikat secara hukum (*legaly Binding*) dan menjadi kewajiban bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN, sebagai berikut; “Negara-negara Anggota wajib menyelenggarakan perundingan-perundingan yang diarahkan untuk mempercepat komitmen-komitmen Negara-Negara Anggota terkait dengan produk-produk TIK, layanan TIK dan penanaman modal berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, dan Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN.” (pasal 2) dan “1. Setiap Negara Anggota wajib menghapuskan bea Impor pada produk-produk Sektor Integrasi Prioritas sesuai dengan Pasal 19 (2) (a)(i) dan Pasal 19(2)(c) sesuai Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.”

4. Strategi Pendidikan Multikultural Menghadapi MEA.

Strategi bisa diartikan sebagai “siasat, kiat, trik atau cara” sedangkan secara umum strategi ialah suatu garis besar/pedoman dalam bertindak untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Pupuh Fathorroman. 2007, bersifat umum pelaksanaan strategi mempunyai 4 (empat) dasar, Yakni ;

1. Mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman.
2. Mempertimbang dan memilah system yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat
3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik yang dianggap paling tepat dan efektif
4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau criteria keberhasilan.

Demikian juga dengan Pengelolaan pendidikan multicultural tidak bisa lepas dari upaya melakukan pilihan terhadap perspektif pengelolaan pluralisme budaya yang ada di masyarakat.

Arus globalisasi yang multi dimensional meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dipermukaan sangat terlihat nyata terutama dibidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi , komunikasi, dan transpormasi, diperlukan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasinal, mata uang dolar sebagai uang internasional juga pertumbuhan di sektor pariwisata merupakan penyebab lain derasnya arus globalisasi ekonomi dunia.

Untuk hal tersebut pendidikan, terutama pendidik berperan sebagai motor penggerak untuk mempersiapkan SDM yang mempunyai daya saing tinggi, sehingga pendidik mempunyai tugas profesional tetapi juga mempunyai tugas manusiawi dan tugas kemasyarakatan (Beni, 2008 : 18).

1. **Tugas profesional** : seorang pendidik mentransperkan ilmu pengetahuan ketrampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis.
2. **Tugas Manusiawi** : membantu siswa agar bisamenjadi manusia yang sebaik – baiknya, dapat mengembangkan daya berpikir, penalaran kearah keadaban demi kebaikan kehidupannya, ini dilakukan secara menyaluruh dan terpadu.
3. **Tugas Kemasyarakatan** : konsekwensi guru sebagai warga Negara yang baik, maka seorang guru tidak hanya mengajar didalam kelas, tetapi juga harusmampu menjadi katalisator, motivator, dan dinamisator pembangunan.

Dalam penyampainyaannya seorang pendidik menggunakan strategi :

1. Pembelajaran pada unsur kognitif saja tetapi unsur afektif dan psikomotor dilaksanakan secara bersama- sama.
Kementrian Pendidikan Nasional 2010 (Hamdan Hamit.2013) menjelaskan bahwa dalam

- pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter individu dengan menyangkut seluruh aspek kehidupan dari potensi individu manusia baik dari sisi kognitif, afektif, psikomotor dan interaksi sosial kultural dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat yang berlangsung seumur hidup, dengan sistem pendidikan yang menyangkut olahhati (*Spiritual and Emotional Development*), olahpikir (*Intellectual Development*), olahraga kenestik (*Physical and kinestik Development*), dan olahrasa dan karsa (*Affective and creativity Development*)
2. Penekanan pada kemampuan berfikir kritis yang inovatif dengan kemampuan berbahasa Internasional. Apapun bentuknya seorang pendidik dituntut harus banyak belajar dan membaca setuasi untuk mengikuti tuntutan zaman dan trampil menyelipkan system nilai kemampuan berfikir siswa yang kreaktif dan inovatif serta fokuskan pada kemampuan berbahasa Asing terutama bahasa Inggris.
 3. Penekanan pada pembelajaran kontekstual untuk membentuk nilai dan sikap kompetitiv yang positif, selanjutnya **ketiga** strategi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *convensionalism*, perspektif *deconvensionalism* dan *constukctivism*.

Pendekatan *convensionalism*, merupakan pendekatan untuk belajar memahami menghargai keaneka ragam identitas budayadalam masing –masing entitas diberi hak membawa symbol-simbol dan lambang mereka masing-masing ke ranah publik dalam konsep kesatuan. Perspektif *deconvensionalism* diperlukan penataan symbol-symbol atau identitas yang sifatnya pertikular sebaiknya tidak diperlukan, tetapi cukup menggunakan lambang bersama *Constukctivism* merupakan proses pengembangan, membangun, menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif untuk dikembangkan melalui implementasi menjadi pengetahuan baru.

C. PENUTUP

Sejak awal ASEAN didirikan tahun 1967 dengan kesepakatan Konsep untuk mewujudkan Asia Tenggara Bersatu merupakan cita – cita, dengan tujuan yaitu membina perdamaian, menciptakan kesejahteraan dan membangun identitas regional, untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Pelaksanaan MEA menjadi 2015 dan pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 12- 13 Januari

2007, dengan anggota mencapai 12 negara

MEA dibangun dengan system perekonomian di Kawasan Asean tentunya dengan segala risiko-risiko yang muncul bisa berdampak positif dan negatif ini merupakan ancaman bagi pembangunan,

Pendidikan multicultural merupakan upaya untuk mengatasi dan menyikapi dampak resiko –resiko yang terjadi termasuk permasalahan yang muncul diharapkan adanya kebijakan Negara yang tepat dan cepat dengan terutama pengembangan sumberdaya manusia

(SDM) dan sarana prasarana, serta memperkuat lembaga pendidikan dan pendidik harus bisa berperan sebagai motor penggerak.

Pelaksanaannya pembelajaran multikultural dengan strategi ; Pembelajaran diarahkan tidak hanya pada unsur kognitif saja tetapi unsur afektif dan psikomotor dilaksanakan secara bersama - sama, penekanan pada kemampuan berfikir kritis yang inovatif dengan kemampuan berbahasa Internasional, penekanan pada kontekstual untuk membentuk nilai dan sikap kompetitiv yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni S. Ambarjaya. 2008. “*Model Pembelajaran Kreatif* “ Bandung. Tinta Emas Publishing.
- CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Ratna Shofi Inayati. 2008. “*Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*”, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dochak Latif. 2001. “*Pembangunan Ekonomi dan kebijakan Ekonomi Global*”. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Menterian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia . 2013. “*Materi Ajar Mata Kuliah Kewarganegaraan*”. Jakarta.
- Krause, Kerri – Lee, et.al, “*Educational Psychology For Learning and Teaching*”, Australia Pty Lmted, 2007.
- Lue , 2012, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan*”, UNMER . Malang.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.”*Tentang Sistem Pendidikan Nasional*”.

- Todaro, Michael P. 1983. "*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I*". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rugman, Alan. 2000." *The End Of Globalization. Sidney Autralia* ", Random House Business Book.
- Syaidiman Suryohadiprojo. 1998 . "*Reformasi Ekonomi Politik dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Nasional*" Jakarta. AFKAR Edisi Vol. V, No.1.
- Pupuh Faturahman. 2007. "*Strategi Belajar Mengajar*" , Refika Aditama' Bandung.
- Hamdan Hamit. 2013." *Pendidikan Karakter*" . Pustaka Setia. Bandung
- Quezada, Reyes dan Jaime J.Romo, "*Multiculturalism, Peace Education and Social Justice in Teacher Education, dalam Multicultural Education, San Francisco : Vol.11, Spring 2004.*
- Zainudin Maliki. 2010. "*Sosiologi Pendidikan* ". Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.